

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 September 2019/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SUB UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BASSENG**
2. Jabatan : **DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI**
3. NHK : **158586**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/500 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/120 m2 di GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/36 m2 di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/72 m2 di KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/120 m2 di GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	76.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU TARUNA MINIBUS Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	223.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	120.554.592
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----



Sub Total	Rp.	2.420.054.592
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.420.054.592

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Oktober 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.